

Buletin

PARAMPARA

Edisi Desember 2018

Media Komunikasi BPSDM Kementerian PUPR

Aksi SDM PUPR dalam Mitigasi Bencana

➤ **Aksi Cepat Tanggap PUPR :**
Mitigasi Bencana Lombok

➤ **BPSDM PUPR :**
Sepanjang 2018 BPSDM Raih
Sejumlah Penghargaan



9 772527 669008

daftar isi

BERITA UTAMA

- 04 > Tanggap Bencana Lombok: Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui Pelibatan Masyarakat
- 06 > Sumbangsih Nyata Insinyur Muda PUPR di Pulau Seribu Mesjid
- 08 > Pembangunan Fasilitas Rumah Hunian/Pendidikan Sementara
- 11 > CPNS PUPR, Aktualisasi dalam Misi Kemanusiaan
- 13 > Kondisi Rehab Rekon di Lombok
- 15 > Tutup Tahun 2018: BPSDM Bukukan Capaian Positif

INFO BALAI

- 10 > Teuku Faisal Riza, S.T. Menikmati Mutasi Untuk Memperkaya Pengalaman

INTERMEZZO

- 17 > e-Learning, Percepatan Peningkatan Kompetensi ASN

LENSA KITA

- 18 > Lomba Mewarnai dan Menggambar Tingkat TK & SD dalam Hari Bhakti PU
- 19 > Sertifikasi Akreditasi LAN kepada Kementerian PUPR

TAHUKAH ANDA?

- 20 > Politeknik PU: Siap Mencetak Tenaga Konstruksi Kompeten di Tahun 2019

INSPIRATIF

- 22 > Pegawai Teladan: Apresiasi, Motivasi, & Inspirasi

PARAMPARA adalah buletin/majalah internal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan diharapkan menjadi salah satu alat/media komunikasi yang dapat menjembatani kebutuhan informasi dan komunikasi di lingkungan SDM-PUPR.



AKTUALITA

- 24 > Lulus Uji Sertifikasi: Kementerian PUPR Raih 3 Sertifikat Akreditasi
- 26 > BPSDM Turut Ambil Bagian dalam Pameran Pembangunan Infrastruktur Harbak PU-73 di Gedung Sate, Bandung

KOMUNITAS

- 28 > Genrud PUPR, Ujung Tombak Kementerian PUPR

WACANA

- 30 > Inovasi Rumah Instan: Solusi Penyediaan Rumah yang Layak, Aman, dan Terjangkau



WACANA

- 32 > Sharing Knowledge Sistem Pembangunan Waduk Bersama Prof. Pierre Y Julien dan Mr. Kao

Q & A

- 34 > Tanya Jawab Seputar Aplikasi E-Learning

SELINGAN

- 35 > BPSDM & Komik ABC

PARAMPARA

DEWAN REDAKSI

KETUA :

K. M. Arsyad

WAKIL KETUA :

S. Bellafolijani Adimiharja

ANGGOTA :

Thomas S. Aden

Yudha Mediawan

Nicodemus Daud

PEMIMPIN REDAKSI

KETUA : **Yunaldi**

WAKIL KETUA : **Lisniari Munthe**

REDAKTUR PELAKSANA

Nieke Permanik

Satya Raharja

Indra Gunawan

KONTRIBUTOR

Rismawati

Rizza Kumalasari

Endah Prihatiningtyas

ALAMAT REDAKSI

Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Gedung Heritage Lt.2,
Jl. Pattimura 20,
Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan



SEMANGAT Pagi!

Di tengah duka negeri ini akibat bencana gempa dan tsunami yang melanda Lombok (NTB) dan Palu-Donggala (Sulteng), SDM PUPR kembali dipercaya untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah bencana. Ratusan insan muda PUPR sebagai ujung tombak pun turun langsung ke daerah bencana untuk melaksanakan tugas mitigasi bencana.

Kehadiran insan PUPR di wilayah bencana tersebut diharapkan mampu membawa perubahan positif, baik bagi kehidupan sosial, ekonomi, maupun kondisi mental masyarakat pascabencana.

Sebaliknya, bagi insan PUPR sendiri, penugasan ini justru memberikan pengalaman serta pembelajaran yang sangat berharga. Beragam tantangan yang dihadapi, suka duka, pun menjadi kisah indah yang mengisi lembar demi lembar Buletin Parampara edisi ini.

Aksi SDM PUPR tak hanya membawa perubahan positif bagi daerah bencana dan masyarakat yang terdampak bencana. Melainkan, juga mampu menorehkan prestasi dalam buku perjalanan PUPR. BPSDM pun menutup tahun 2018 dengan sejumlah prestasi.

Prestasi ini bukan sekadar piagam ataupun tropi penghargaan. Namun, merupakan wujud kinerja terbaik BPSDM sekaligus jaminan kualitas atas setiap penyelenggaraan pengembangan SDM yang dilaksanakan BPSDM.

Selamat tahun baru! Jaya terus insan PUPR!

Tim Redaksi Buletin Parampara

Tanggap Bencana Lombok: Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi melalui Pelibatan Masyarakat

Gempa bumi yang melanda wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Pulau Lombok dan Sumbawa, menjadi keprihatinan negeri ini.

KEPRIHATINAN yang menggugah empati dan kepedulian seluruh elemen negeri ini. Tak terkecuali, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR). Pascagempa di Lombok dan Sumbawa, Kementerian PUPR pun segera melaksanakan aksi cepat tanggap sebagai upaya pemulihan infrastruktur guna mengembalikan kehidupan sosial dan perekonomian NTB.

Percepatan Rekon

Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi (rekon) infrastruktur, baik sarana prasarana publik maupun permukiman, terdapat 4 aspek utama yang dilaksanakan Kementerian PUPR. Pertama, pendistribusian sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, seperti hidran umum berkapasitas 2.000 liter, mobil tangki air, toilet portable, dan tenda hunian darurat.

Kedua, pemanfaatan sumur PAT (Pompa Air Tanah) guna pemenuhan sumber air bersih di beberapa kecamatan, seperti Pemenang, Tanjung, Kayangan, Bayan, dan Gangga. Ketiga, perbaikan jalan dan jembatan. Gempa menyebabkan 32 ruas jalan rusak—meskipun dalam kondisi fungsional dan 12 jembatan rusak. Keempat, pembangunan hunian berteknologi tahan gempa bagi masyarakat, baik Rumah Instan Sederhana dan Sehat (RISHA), Rumah Instan Kayu (RIKA), maupun Rumah Instan Konvensional (RIKO).

Tak hanya menggarap keempat aspek tersebut, Kementerian PUPR juga melakukan berbagai upaya percepatan proses rekon. Hal ini sesuai dengan amanah Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa

bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di NTB.

Langkah percepatan yang ditempuh, salah satunya, adalah dengan menerjunkan 400 orang insinyur muda CPNS PUPR untuk melakukan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan dalam pembangunan rumah tahan gempa.

“Bukan hanya itu, teman-teman CPNS ini juga bertugas untuk membuat RAB, desain, hingga spesifikasinya. Sambil melakukan pendampingan, mereka pun melakukan sosialisasi, khususnya tentang RISHA,” ujar A. Gani Ghazaly.

Guna mempercepat pembangunan RISHA, Kementerian PUPR juga mendorong BUMN Karya (PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya) dan PT Hutama Karya untuk memproduksi RISHA dalam skala besar dengan membuka *workshop* di 5 lokasi yang



A. Gani Ghazaly.



berlokasi di Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Timur.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, bahkan berkoordinasi langsung dengan Kadin Provinsi NTB hingga telah dibuka 8 depo material konstruksi. Kedelapan depo akan menyediakan material konstruksi dalam jumlah cukup dan harga terjangkau.

Disamping itu, percepatan juga dilakukan dari sisi penyaluran bantuan dana perbaikan rumah.

Dalam hal ini, Pemerintah menyederhanakan format pencairan dana perbaikan rumah dari 17 formulir menjadi 1 formulir. Bantuan dana tersebut diberikan untuk rumah yang rusak berat sebesar

Rp 50 juta, rumah rusak sedang sebesar Rp 25 juta, dan rumah rusak ringan sebesar Rp 10 juta.

Pelibatan Masyarakat

Dalam proses rekon, khususnya pembangunan rumah, Pemerintah melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diwujudkan pula melalui pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di tingkat kecamatan. Tujuannya adalah untuk menjamin akuntabilitas bahwa penerima bantuan tepat sasaran.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 530 Pokmas, yang masing-masing beranggotakan 10—20 orang. Pokmas inilah yang akan melaksanakan pembangunan rumah secara bergotong royong dengan metode Rekompak (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas). Dalam prosesnya,

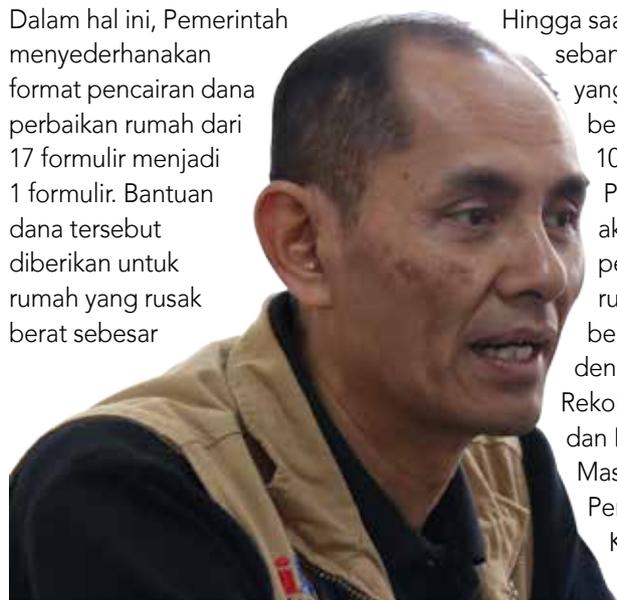
masyarakat akan didampingi Tim Pendamping yang terdiri dari Tim Balitbang, fasilitator, TNI/Polri, relawan, dan mahasiswa KKN Tematik. Dari hasil pendataan, sebanyak 75 ribu rumah warga terverifikasi rusak berat. Rekon rumah ditargetkan rampung dalam waktu 6 bulan, terhitung sejak 1 September 2018.

Selain hunian masyarakat, sejumlah fasilitas publik juga terdampak bencana. Hasil identifikasi BNPB dan Kementerian PUPR, sebanyak 972 fasilitas publik dilaporkan rusak. Fasilitas publik terdampak terdiri dari fasilitas pendidikan, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, pasar, dan perkantoran. Rekon fasilitas publik ini dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui kontraktor.

Fasilitas publik yang telah selesai dibangun dan dimanfaatkan pun diberi label sertifikat bahwa bangunan tersebut aman dan layak digunakan. Misalnya saja, pada RSUD Kota Mataram dan SMPN 6 Mataram.

“Kami harus membangun ruang sementara yang bisa menenangkan masyarakat yang menghuninya, yakni bahwa bangunan itu kuat dan aman. Karena di sini, mereka masih trauma, terutama anak-anak,” jelas Johnny Rakhman.

Untuk melaksanakan tanggap darurat tersebut, Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,9 triliun. Dari nilai tersebut, Kementerian PUPR berkontribusi sebesar Rp 170 miliar. Anggaran Kementerian PUPR diperuntukkan bagi pembangunan sumur bor serta penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.



Johnny Rakhman.



Sumbangsih Nyata Insinyur Muda PUPR di Pulau Seribu Masjid

Sebagai aparatur negara, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh negara.

SEPERTI HALNYA, para insinyur muda CPNS Kementerian PUPR yang siap melaksanakan tugas sebagai relawan di lokasi bencana di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Di tengah kondisi yang serba terbatas akibat bencana, mereka pun siap membantu, meringankan beban penderitaan masyarakat NTB.

Tugas Negara

Pascabencana gempa di Lombok, Kementerian PUPR segera mengambil langkah-langkah sebagai aksi cepat tanggap bencana. Salah satu langkah yang diambil Kementerian PUPR adalah dengan menerjunkan ratusan insinyur muda CPNS PUPR untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman di NTB sekaligus mendorong pemulihan kehidupan sosial dan perekonomian di NTB.

Sebanyak lebih dari 400 orang insinyur muda telah ditugaskan di Lombok dan sekitarnya. Sejak akhir Agustus 2018 lalu, Kementerian PUPR memberangkatkan secara bertahap sebanyak 178

orang dari Lanud Husein Sastranegara, Bandung dan 222 orang dari Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pada medio bulan November 2018, Kementerian PUPR kembali memberangkatkan sebanyak 96 insinyur muda CPNS PUPR, yang terdiri dari 57 orang perempuan dan 39 orang laki-laki. Para insinyur muda ini ditugaskan untuk memperkuat dan mempercepat pembangunan rumah instan tahan gempa, baik RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat), RIKA (Rumah Instan Kayu), maupun RIKO (Rumah Instan Konvensional).

Di antara insinyur muda yang bertugas di NTB tersebut, adalah Rizky Ardiansyah dan Reyhan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Keduanya ditugaskan sebagai tenaga pendamping dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang terdampak bencana.

“Penugasan ini kami terima cukup mendadak. Meskipun sempat bingung—karena masih ada tugas lain di Jakarta yang harus kami selesaikan, kami siap untuk diberangkatkan ke NTB. Ini adalah tugas

negara, mau tidak mau, kami harus berangkat. Menurut saya, inilah saatnya kami bisa berkontribusi lebih bagi masyarakat dan negeri ini,” ujar Reyhan, insinyur muda lulusan Teknik Sipil.

Tantangan

Ini adalah pertama kalinya bagi Reyhan maupun Rizky, bertugas sebagai relawan di daerah bencana. Penugasan ini pun memberikan pengalaman dan pembelajaran berharga bagi keduanya. Dalam kondisi apa pun, sebagai aparatur negara, mereka harus siap melaksanakan tugas yang diamanahkan negara.

Dari arahan yang diberikan, Rizky dan Reyhan telah mendapatkan gambaran tentang tugas-tugas yang akan dijalankan, yakni tugas pendampingan teknik terkait pembangunan RISHA dan RIKA. “Ternyata, sesampainya di sana, kami tidak hanya mendampingi

dan mengawasi secara teknik,” ujar Rizky.

“Melainkan, juga membuat RAB dan desain, membantu survei ke rumah-rumah warga, melakukan perencanaan teknis validasi sketsa, serta membantu melengkapi berkas-berkas administrasi untuk membuka rekening Pokmas (Kelompok Masyarakat),” lanjutnya.

Reyhan menambahkan, salah satu tantangan besar yang harus mereka hadapi adalah berkomunikasi dan berhadapan dengan masyarakat. “Kami harus melakukan sosialisasi tentang RISHA dan RIKA dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa rumah ini aman dan tahan gempa,” ungkap Reyhan. “Dalam tugas itu, kami juga sering dimarahi warga ataupun mendapatkan kata-kata kasar. Salah satu sebabnya adalah karena tersendatnya pembangunan RISHA karena panelnya belum tersedia,

sementara warga sudah siap dan pondasi pun sudah jadi,” kenang Reyhan.

Tantangan lainnya adalah pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan masyarakat kepada para relawan. “Jadi, di sini ini, selain melaksanakan tugas negara, kami juga memberikan dukungan dari segi emosional/psikologis kepada masyarakat. Tak jarang, mereka menceritakan keluh kesahnya kepada kami” papar Rizky.

Baik Reyhan maupun Rizky, berharap ke depannya dapat terjalin sinergi yang kuat dan harmonis dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana. Setiap elemen di dalamnya—baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, *stakeholder*, swasta, hingga masyarakat—dapat bersinergi untuk membangun kembali kehidupan sosial dan perekonomian daerah bencana.



Pembangunan Fasilitas Rumah Hunian/ Pendidikan Sementara

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di NTB.



PEMERINTAH berupaya membantu masyarakat melalui perpanjangtanganan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Salah satu kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan warga adalah tempat tinggal. Untuk itu, Kementerian PUPR lekas membuat Hunian Sementara (Huntara) bagi warga NTB. Rencananya bakal menjadi tempat tinggal masyarakat hingga relokasi permukiman rampung. Huntara tersebut merupakan tahap pertama dan bisa saja bertambah jika jumlah pengungsi yang membutuhkan lebih banyak.

Huntara yang disiapkan bermodel *knockdown* dengan ukuran 12 meter x 26,4 meter, serta dibagi menjadi 12 bilik. Tiap bilik dihuni oleh satu keluarga. Sebanyak 1.200 unit huntara dapat menampung 14.400 keluarga. PUPR menargetkan ada satu unit mockup huntara pada pekan ini, yang bisa dijadikan contoh untuk pembangunan berikutnya. Pembangunannya akan



dilakukan oleh kontraktor dan diharapkan dapat mulai dihuni secara bertahap pada pekan berikutnya. Johnny Rakhman menerangkan huntara akan dibangun dengan sistem kluster di lima zona, dengan pertimbangan faktor ketersediaan lahan dan keamanan lokasi dari dampak gempa. Tiap kluster terdiri atas 10 unit huntara, serta memiliki satu PAUD dan SD, tempat sampah, ruang terbuka untuk aktivitas warga, serta tempat parkir motor. Secara keseluruhan, proyek ini ditargetkan selesai dalam dua bulan.

Konstruksinya menggunakan baja ringan dengan dinding berbahan *Glassfiber Reinforced Cement (GRC)*. Selain itu, setiap unit huntara dilengkapi 4 toilet, 4



kamar mandi, *septic tank*, tempat mencuci, dan dapur, plus listrik berdaya 450 watt di setiap bilik. Pemilihan titik huntara di perkotaan dan berada di luar areal perumahan bukan di atas tanah rumah para korban. Hanya saja, lokasinya tidak jauh dari tempat



tinggal sebelumnya. Sementara pembangunan rumah masyarakat ditargetkan selesai paling lambat Desember 2018. Tercatat hingga saat ini, ada 78.000 rumah yang rusak. Data terakhir, 20.000 rumah rusak berat di NTB.

Hunian sementara (huntara) adalah tempat tinggal sementara selama korban bencana mengungsi, baik berupa tempat penampungan massal maupun keluarga, atau individual. Huntara tersebut bisa menggunakan bangunan yang sudah ada atau tempat berlindung yang bisa dibuat dengan cepat seperti gubug darurat, tenda, dan sebagainya.

Menurut Buku Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bantuan penampungan/hunian sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya, yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.

Adapun standar minimal bantuan huntara menurut buku pedoman tersebut yaitu:

- Berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang.
- Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan.
- Memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum.
- Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.

Tujuan dibangunnya huntara untuk mengamankan pengungsi dengan menjauhkannya dari tempat bencana. Bangunan huntara yang meliputi sarana dan prasarannya hampir semuanya bersifat non-permanen untuk menekankan fungsinya sebagai tempat tinggal pada masa transisi.

Hal utama yang tidak boleh dilupakan dalam membangun huntara yaitu ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur, ketersediaan berbagai pelayanan, dan ketersediaan akses. Semua hal tersebut harus disesuaikan dengan budaya setempat.

Dana yang digunakan untuk membangun kawasan hunian sementara bersumber pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten
- Dana Swasta
- Dana masyarakat
- Dana-dana lain yang sah.

Huntara bisa dimanfaatkan selama dua tahun sampai hunian tetap selesai dibangun pemerintah. Kementerian PUPR juga membuka kesempatan bagi pihak lain untuk membangun huntara di atas lahan yang telah disiapkan dengan desain yang sama. **(Red)**



MENIKMATI MUTASI UNTUK MEMPERKAYA PENGALAMAN

Sejak pertengahan tahun 2017, Teuku Faisal Riza, S.T. dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang, Sumatra Selatan.

SELEKSI, mutasi, maupun promosi adalah hal yang lazim dalam sebuah organisasi pemerintah. Kegiatan tersebut sejalan dengan upaya pengembangan karir dalam rangka mendapatkan SDM aparatur yang berkualitas dan berkinerja tinggi.

Di sisi lain, mutasi—khususnya, dapat memperkaya pengalaman dari SDM aparaturnya. Seperti halnya, yang dirasakan dan dialami Faisal. Sejak pertama kali bergabung di PUPR sebagai tenaga honorer hingga saat ini menjabat sebagai Kepala Badiklat, Faisal telah beberapa kali ditugaskan di sejumlah daerah.

Mulai dari Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau, hingga Provinsi Sumatra Selatan. Tak hanya berpindah daerah, Faisal pun ditugaskan dengan bidang yang berbeda-beda. Mulai dari Ditjen Cipta Karya—yang saat itu bernama Ditjen Tata Perkotaan Tata Perdesaan (TPTP), hingga saat ini di BPSDM.

“Saya pribadi, dipindahtugaskan dari satu lokasi ke lokasi lainnya itu justru menyenangkan. Kebetulan, saya sudah terbiasa dengan kondisi tersebut sejak saya kecil. Alhamdulillah, saya termasuk yang cukup mudah beradaptasi dengan lingkungan baru,” ujar Faisal.

Komunikasi

Menurutnya, kunci utamanya adalah komunikasi. Karena itu, Faisal menegaskan pentingnya membangun komunikasi dengan rekan-rekan di tempat kerja yang baru.

“Saya akui, di sini (Palembang), karena teman-teman di sini, saya belum pernah mengenal sama sekali, jadi tantangan tersendiri dalam membangun

komunikasi. Sesekali terjadi miskomunikasi kecil, lumrah menurut saya,” akunya.

Begitu pun dengan penugasan di BPSDM ini, juga menjadi tantangan tersendiri untuk Faisal. Namun, satu hal yang digarisbawahinya—sekaligus menjadi harapannya adalah bahwa, di tengah tugas pengembangan seluruh SDM di lingkungan PUPR, teman-teman di BPSDM sejatinya bisa meng-*upgrade* dirinya sendiri terlebih dahulu.

“Dulu, saya sering dengar anekdot, seperti ini: arsitek, tapi arsitektur rumahnya tidak jadi-jadi karena sibuk bikin rumah orang lain. Nah, saya berharap teman-teman di BPSDM tidak lupa untuk mengembangkan kompetensi dan potensi dirinya. Sementara, dia harus selalu melakukan pengembangan untuk rekan-rekannya,” pungkas Faisal.





CPNS PUPR, Aktualisasi dalam Misi Kemanusiaan

Pelatihan Dasar (Latsar) dan Seminar Aktualisasi merupakan tahapan proses yang harus dilalui Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

DI PENGHUJUNG 2018, Kementerian PUPR melalui BPSDM menyelenggarakan Seminar Aktualisasi dalam rangka Pelatihan Dasar CPNS Formasi 2017 untuk Peserta Operasi Kemanusiaan NTB.

Pembekalan

Selama tiga hari, 6—8 November 2018, tak kurang dari 200 orang CPNS Formasi 2017 mengikuti Seminar Aktualisasi yang diselenggarakan di Lombok, NTB. Selain untuk mengikuti seminar aktualisasi, para peserta juga mengikuti *Assessment Test*, bagi yang belum mengikuti tes tersebut.

Kewajiban mengikuti Seminar Aktualisasi dan Latsar

ini telah diatur dalam PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Di mana, Calon PNS harus melalui masa percobaan dan lulus dari Pelatihan Dasar (Latsar). Kemudian, dituangkan pula dalam Perka LAN No. 25





Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa peserta Latsar harus melaksanakan Habitulasi atau aktualisasi hasil pembekalan.

Latsar ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan PNS yang profesional. Hal ini sesuai dengan UU ASN Tahun 2014, bahwa PNS adalah sebuah profesi. Maka, setiap PNS harus memahami profesinya, yakni mengetahui sifat, kewajiban, dan haknya.

Untuk itu, Latsar pun bertujuan untuk membekali dan membentuk karakter CPNS. Pembekalan yang diberikan kepada CPNS meliputi, antara lain, Pelatihan Bela Negara, Pengenalan Kelitbang, Materi Jabfung, Pembekalan Teknis, dan Manajemen Konstruksi.

Dengan pembekalan yang diberikan, CPNS diharapkan siap menghadapi segala tantangan pekerjaan. Salah satunya, tantangan saat bertugas di lapangan dalam rangka operasi kemanusiaan, seperti yang dilaksanakan para CPNS di Lombok pascabencana gempa bumi.

Aktualisasi di Lapangan

Dalam sambutannya saat membuka acara Seminar Aktualisasi, Kepala

Dengan pembekalan yang diberikan, CPNS diharapkan siap menghadapi segala tantangan pekerjaan.

BPSDM—Lolly Martina Martief menyampaikan apresiasi kepada CPNS yang, selama ini bertugas di wilayah terdampak bencana di Lombok. “Saya sudah mendengar laporan dari Tim Satgas bahwa, ternyata, saudara-saudara menunjukkan kerja sama yang baik selama bertugas di lapangan,” ujar Lolly.

“Hal ini membuktikan bahwa Saudara-Saudara telah diasah sensitivitasnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Biasanya, *Engineer* itu kurang sensitif terhadap masalah-masalah sosial,” tambahnya.

Menurutnya, hal ini menjadi nilai lebih CPNS PUPR. Disamping, tambahan pengalaman selama

bekerja dalam program kemanusiaan di Lombok. “CPNS PUPR mendapat kesempatan untuk terjun langsung di lapangan, bekerja untuk kemanusiaan. Inilah yang tidak diperoleh CPNS dari kementerian lainnya dalam Latsar,” tegas Lolly.

Kesempatan aktualisasi di lapangan inilah yang diperoleh Rizky Ardiansyah, CPNS dari Dirjen SDA. Menurutnya, sebelum ditugaskan dalam misi kemanusiaan di Lombok, Rizky sedang bersiap untuk Seminar Aktualisasi.

“Setelah sempat dibuat bingung antara menyiapkan seminar atau persiapan ke Lombok, akhirnya seminar dibatalkan dan kami langsung diberangkatkan ke Lombok. Namun, ternyata, kegiatan kami selama di Lombok ini dinyatakan sebagai aktualisasi kami. Jadi, kami mendapat kesempatan untuk mengaktualisasikan segala hal yang kami peroleh selama Latsar, di tengah masyarakat,” papar Rizky.

Assessment Test

Sementara, untuk *Assessment Test* yang diikuti hanya sebagian peserta, Lolly mengingatkan bahwa tes tersebut penting dan wajib diikuti. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui dan memotret potensi diri. Mengingat, sesuai peraturan, PNS haruslah dikelola sesuai dengan talentanya.

Nantinya, hasil *Assessment Test* dapat menjadi ukuran untuk *talent pool* guna mencari PNS yang akan menjadi bagian dari *high flyer*, yaitu memiliki kemampuan yang didorong untuk dipromosikan. Karenanya, Lolly mengimbau kepada seluruh peserta tes untuk mengerjakan tes secara serius.

Kondisi Rehab Rekon di Lombok

Sebagaimana kita tahu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah sigap dalam upaya rekonsiliasi atas bencana yang terjadi di Lombok, NTB beberapa pekan lalu. Selain proses rekonstruksi sejumlah fasilitas publik seperti pasar, rumah sakit, puskesmas, rumah ibadah hingga sekolah.



PUPR pun turut merehabilitasi mental pasca bencana, karena sedikit banyak penduduk NTB merasakan trauma yang mendalam jika berada di dalam ruangan. Untuk itulah, melalui interview dengan beberapa petugas dari PUPR yang ditunjuk oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kami ingin menceritakan kondisi rehab rekon terkini.

Bencana terjadi sejak 29 kerusakan tempat, Kabupaten Kabupaten

gempa bumi yang di Pulau Lombok Juli 2018 telah mengakibatkan di sejumlah antara lain Lombok Utara, Lombok Timur,



Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah dan berdampak pula di Kabupaten Sumbawa. Bencana gempa tersebut mengakibatkan banyaknya kerusakan sarana dan prasarana umum ke-PU-an seperti rumah tinggal, jalan, jembatan, sekolah, sarana kesehatan, perkantoran, dan fasilitas penting lainnya.

Pemerintah berupaya mempercepat proses pemulihan pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satu proyek besar adalah membangun kembali rumah masyarakat yang rusak.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga saat ini tercatat 167.961 rumah warga rusak berat. Dari jumlah tersebut, 32 ribu diantaranya sudah diverifikasi. Dan menurut SNVT Penyediaan Perumahan bahwa terjadi kerusakan rumah tinggal dengan kategori rusak berat sebanyak 17.796, rusak sedang sebanyak 1.846, dan rusak ringan sebanyak 11.392. Sehingga, total kerusakan rumah tinggal di NTB adalah sebanyak 32.717 rumah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan

A. Gani Ghazaly.

rumah akan dilakukan sendiri oleh warga bersama tim gabungan yang sudah disiapkan oleh Kementerian PUPR.

“Untuk pembangunan perumahan ini konsepnya swakelola dengan Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (Rekompak),” kata Gani Ghazaly mengulang yang disampaikan oleh Basuki. Di sini Gany Ghazaly memiliki tugas sebagai Ketua Harian Pusat Komando Satgas PB PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam sela-sela kesibukannya kami temui di Posko Darurat Mataram.

Dengan demikian, masyarakat akan terlibat aktif dalam pembangunan rumahnya sendiri, sehingga pembangunan rumah diyakini lebih cepat daripada dikerjakan kontraktor. “Jadi, tidak ada kontraktor untuk pembangunan rumah itu,” tegasnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang didampingi Dirjen Cipta Karya Danis Sumadilaga mengungkapkan gerak cepat Kementerian PUPR secara khusus untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di Provinsi NTB telah mengirim 455 insinyur muda yang merupakan CPNS Kementerian PUPR formasi 2017. Para CPNS ini nantinya akan mendampingi pembangunan rumah rusak berat dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh REKOMPAK dan fasilitator yang akan direkrut oleh Satker PKP Provinsi NTB sebanyak 135 orang selama satu bulan.

Untuk menangani pembangunan rumah, khususnya bagi masyarakat

yang rumahnya mengalami kerusakan berat akan dibangunkan oleh pemerintah rumah tahan gempa dengan konsep Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). RISHA merupakan teknologi rumah layak huni dan terjangkau menggunakan sistem *knock-down* dan dapat dibangun secara bertahap. Setiap modul memiliki tiga jenis komponen yang memiliki sifat fleksibel dan efisien dalam konstruksi bahan bangunan. Konsep RISHA sudah diterapkan sebanyak 10 ribu unit di Nanggroe Aceh Darusalam pasca bencana tsunami serta penerapan model di Jawa Barat, Kepulauan Rias, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Riau, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Yogyakarta.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian PUPR, di bidang jalan dan jembatan akan melakukan perbaikan jalan dan perkuatan jembatan, bidang air dan sanitasi akan melanjutkan pelayanan darurat hingga lokasi pengungsian dikosongkan, perbaikan kualitas

distribusi untuk Rumah Sakit, penanganan persampahan darurat di daerah Lombok Utara dan Lombok Timur, pembangunan sanitasi komunal permanen untuk mendukung pembangunan kembali rumah masyarakat dengan RISHA, bidang sarana dan prasarana umum akan melakukan rehabilitasi rekonstruksi sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang mengalami kerusakan.

Menurut Gany Ghazaly pun dilihat dari kondisi di lapangan sudah masuk ke tahap pemulihan. Karena data di lapangan menunjukkan bahwa aktifitas warga sudah mulai berjalan normal. Contohnya aktifitas di pasar, dan sekolah.

“Kesulitan kami tentunya ada pada masih sedikitnya UMKM atau BUMN yang tergerak untuk menyediakan bahan baku material pembuatan RISHA. Sehingga target pembangunan rumah sedikit terhambat namun selain itu, seluruh aspek penanggulangan bencana sudah jalan sesuai prosedur”, pungkask Gany.



BPSDM Bukukan Capaian Positif

BPSDM Kementerian PUPR menutup tahun 2018 dengan sejumlah capaian terbaik. Dalam rangkaian acara Hari Bhakti PU 3 Desember



CAPAIAN demi capaian itu pun mendapat apresiasi langsung dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dalam gelaran Malam Kilas Balik (MKB) PUPR jelang Hari Bhakti PU ke-73.

Capaian Positif

Sepanjang tahun 2018, BPSDM PUPR menunjukkan kinerja terbaiknya di berbagai bidang. Hal ini dibuktikan—salah satunya—dengan membawa pulang sejumlah penghargaan untuk berbagai kategori. BPSDM meraih predikat Terbaik I dalam Lomba Konten dan Tata Kelola Website Kategori Unit Organisasi. Predikat Terbaik I juga diraih oleh Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat Daerah. Sedangkan untuk Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di Tingkat Pusat, Sekretariat BPSDM meraih peringkat Terbaik III. Balai Diklat PUPR Wilayah I Medan juga menyumbangkan prestasi dengan terpilihnya sebagai Terbaik I dalam Kompetisi Layanan Informasi Publik Kategori Kepatuhan.

Sumbangsih berikutnya diberikan Pusdiklat Sumber Daya Air dan Konstruksi atas raihnya sebagai Terbaik II untuk Kompetisi Pemanfaatan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Keseluruhan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PUPR yang didampingi Sekretaris Jenderal PUPR, Anita Firmanti.

Hadir untuk menerima penghargaan tersebut, perwakilan dari setiap unit kerja BPSDM. Di antaranya, Sekretaris BPSDM, K.M. Arsyad; Kepala Pusdiklat SDA dan Konstruksi, Yudha Mediawan; Kepala Balai Diklat PUPR Wilayah IV Bandung, Moeh. Adam; serta Kepala Bagian Data dan Informasi, Yunaldi. Hadir pula, Kepala Bagian Anggaran dan Umum Pusdiklat SDA dan Konstruksi, Amir Hamzah.

Capaian tahun 2018 ini tak hanya menjadi torehan positif dalam lembar kinerja BPSDM PUPR. Namun, akan menjadi motivasi bagi BPSDM untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dan prima ke depannya. Maka dari itu, BPSDM pun harus bekerja lebih keras, bergerak lebih cepat, dan bertindak lebih tepat.



Portal Informasi

Predikat Terbaik I yang diraih Website BPSDM bukanlah tanpa alasan. Dari seluruh *website* yang tersedia di seluruh unit organisasi (unor) Kementerian PUPR, *website* BPSDM memiliki keunggulan.

Salah satunya adalah konten yang selalu *update*. Disamping itu, *website* BPSDM juga hadir sebagai portal informasi yang mudah diakses oleh publik.

“Kunci kemenangan ini adalah kerja sama dan kerja keras tim. Kami saling berkoordinasi guna meningkatkan fitur dan memperbaiki kekurangan yang timbul,” ungkap Arsyad, Sekretaris BPSDM.

Arsyad menambahkan bahwa kegiatan Lomba Konten dan Tata Kelola *Website* ini dapat sekaligus menjadi sarana berbagi masing-masing unor. Pada akhirnya, diharapkan terjadi peningkatan kualitas informasi dari setiap unor di lingkungan Kementerian PUPR.



e-Learning, Percepatan Peningkatan Kompetensi ASN



DENGAN mengungkap inovasi-inovasi yang dikembangkannya, BPSDM PUPR ikut berpartisipasi dalam Festival Inovasi yang digelar di Graha Makarti Bhakti Nagari, STIA Lembaga Administrasi Negara. Dalam ajang bergengsi ini, inovasi BPSDM PUPR harus bersaing dengan berbagai inovasi yang dikembangkan seluruh Kementerian/Lembaga RI.

Mandiri

BPSDM PUPR mengembangkan sebuah inovasi berupa metode pelatihan berbasis aplikasi, yang disebut dengan *e-Learning*. Inovasi ini dikembangkan guna melakukan percepatan peningkatan kompetensi ASN serta menyelaraskan standar kompetensi antara ASN Pusat dan Daerah.

Pengembangan inovasi ini sendiri dilatarbelakangi oleh adanya gap kompetensi teknis bidang PUPR antara ASN Pusat dan Daerah. Hal ini disebabkan program pelatihan teknis bidang yang belum menjangkau ASN Daerah secara menyeluruh.

Di sisi lain, kerja sama pelatihan dengan Daerah pun belum banyak dilakukan serta keterbatasan jumlah tenaga pengajar dan sarana prasarana. Belum terakreditasinya LPP Daerah pun menyebabkan LPP di daerah belum dapat melaksanakan pelatihan PUPR secara mandiri.

Dengan adanya *e-Learning*, peningkatan kompetensi dapat dilakukan ASN secara mandiri. ASN pun dapat berdiskusi secara *online* dan *realtime* dengan pengajar atau peserta lainnya mengenai topik tertentu. Bahkan, ASN dapat mengikuti tes secara *online*.

Stimulan

Untuk pertama kalinya, *e-Learning* digunakan dalam Pelaksanaan Diklat Sistem Manajemen K3 (SMK3) Konstruksi.

Saat ditemui di sela-sela kegiatan, Sekretaris BPSDM—K.M. Arsyad mengatakan bahwa inovasi ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kompetensi ASN, baik di Pusat maupun Daerah. Bukan hanya itu, inovasi ini pun diharapkan dapat menjadi stimulan bagi terciptanya inovasi-inovasi lain, khususnya inovasi di bidang pengembangan SDM.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Administrasi Nasional (LAN) menggarisbawahi bahwa inovasi di sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pimpinan. Di mana, komitmen dan kapasitas personal seorang pimpinan dalam membawa perubahan merupakan kunci keberhasilan terjadinya perubahan atas inovasi yang dihasilkan.



Lomba Mewarnai dan Menggambar Tingkat TK & SD dalam Hari Bhakti PU

3 Desember 2018



Sertifikasi Akreditasi LAN kepada Kementerian PUPR



Siap Mencetak Tenaga Konstruksi Kompeten Di Tahun 2019



POLITEKNIK yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah ini ditargetkan beroperasi pada tahun 2019 mendatang.

Cetak Tenaga Kerja Kompeten

Tujuan utama pendirian Politeknik PU adalah untuk mencetak tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan ahli di spesifikasi bidang tertentu. Bukan hanya kompeten, Politeknik PU juga akan menelurkan lulusan-lulusan yang siap bekerja pada proyek-proyek infrastruktur, khususnya infrastruktur PUPR. Politeknik PU disiapkan dengan tiga Program Studi



(Prodi), yaitu Prodi DIII Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung, Prodi DIII Teknologi Konstruksi Bangunan Air, dan Prodi DIII Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan. Setiap Prodi direncanakan akan menerima

Guna mencetak tenaga kerja konstruksi yang kompeten di bidang keahlian tertentu, Kementerian PUPR tengah menyiapkan pendirian Politeknik PU.

50 orang mahasiswa, baik dari lulusan sekolah umum maupun lulusan SMA yang telah berpengalaman kerja di bidang PUPR, seperti pegawai atau pekerja proyek Kementerian PUPR.



Dalam membangun Politeknik ini, Kementerian PUPR menggandeng beberapa perguruan tinggi teknik terkemuka, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, IHE *Delft Institute for Water Education* dari Belanda.

Kerja sama mencakup *Training of Trainee (ToT)* bagi para pengajar Politeknik PUPR. Di mana, nantinya, tenaga pengajar Politeknik sebagian besar adalah para ahli di lingkungan Kementerian PUPR yang memiliki kompetensi dan pengalaman panjang dalam menangani berbagai proyek infrastruktur.

Salah satu fokus dalam ToT adalah peningkatan kapasitas pengajar tentang metode pengajaran yang efektif. Kerja sama juga mencakup pemanfaatan akses teknologi IHE Delft serta pengiriman dosen tamu dan



finalisasi ruang administrasi dan ruang perkuliahan Politeknik.

Dengan demikian, kegiatan konsinyasi diharapkan dapat memetakan kondisi eksisting sarana prasarana di Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman. Hal ini akan mempercepat penyusunan usulan prioritas dalam memenuhi kebutuhan Politeknik yang mendesak. Misalnya saja, kebutuhan akan tersedianya

praktisi dari IHE Delft.

“Nantinya, pegawai PUPR yang menjadi pengajar/dosen akan tetap menjadi pegawai PUPR, dengan status Jafung Peneliti dan pembinaannya berada pada masing-masing K/L, seperti jafung lainnya,” jelas K.M. Arsyad, Sekretaris BPSDM PUPR.

Akreditasi & Konsinyasi

Dalam rangka menyiapkan lembaga pendidikan yang andal dan profesional, Kementerian PUPR melakukan sertifikasi Politeknik oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Dalam kunjungannya, BAN-PT memberikan penilaian kepada para calon dosen Politeknik PU melalui tahap interview.

Kemudian, BAN-PT juga meninjau kelayakan kampus Politeknik PU, termasuk dari sisi sarana prasarana yang tersedia. Ke depannya, BAN-PT akan melakukan re-akreditasi



setiap dua tahun sekali. Lantaran, Politeknik PUPR bersifat afirmasi.

Selain sertifikasi akreditasi, BPSDM melalui Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah melaksanakan Konsinyasi Hasil Pemetaan Sarana dan Prasarana Kampus Politeknik PUPR di Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman, Semarang.

Agenda utama dalam konsinyasi tersebut adalah pembahasan hasil survei kesiapan sarana dan prasarana Politeknik. Kemudian, juga dilakukan pendataan dan perhitungan kembali kebutuhan laboratorium Politeknik serta

Laboratorium Pendidikan Vokasi, Sarana Perkuliahan Vokasi, serta Gedung Administrasi Politeknik PUPR.

Kegiatan pembangunan dan beragam upaya pendukungnya tersebut diharapkan dapat mewujudkan sebuah lembaga pendidikan teknik yang mampu melahirkan SDM-SDM PUPR yang ahli, kompeten, profesional, dan berdaya saing. Pendirian Politeknik PU sekaligus menjadi wujud komitmen Kementerian PUPR dalam mendukung misi penguatan SDM dan perekonomian masyarakat melalui pembangunan sekolah, perguruan tinggi, madrasah, serta pasar induk regional.

Pegawai Teladan: APRESIASI, MOTIVASI, & INSPIRASI

Menjadi pegawai teladan adalah idaman setiap pegawai.

NAMUN, untuk mendapatkan predikat pegawai teladan, memang tidaklah mudah. Lantaran, dibutuhkan kerja keras dan prestasi. Karenanya, sebagai wujud apresiasi kepada pegawai teladan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun memberikan penghargaan. Salah seorang pegawai di lingkungan Kementerian PUPR yang berhasil mendapatkan penghargaan spesial sebagai pegawai teladan adalah Nazib Faizal, S.T., M.Sc., Kepala Subdirektorat Analisis Data dan Pengembangan Sistem, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga. Penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi seluruh pegawai, agar terpacu untuk bisa menjadi yang terbaik.

Kerja Keras dan Berkualitas

Nazib mengatakan, pegawai teladan bukan hanya seorang yang disukai oleh pimpinan atau atasan, melainkan juga orang yang memiliki hubungan baik dengan rekan kerjanya. Selain itu, lanjutnya, pegawai teladan juga berarti juga seseorang yang berdedikasi penuh pada pekerjaannya, dan memiliki kualitas dan karakter lebih daripada rekan sepekerjaan.

Sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian PUPR di tahun 2005, Nazib Faizal langsung mengemban tugas di Tim Independen Tol Cipularang yang menangani longsor di KM92 dan KM96, yang kemudian lanjut di Tim Nasional Lumpur Sidoarjo. Selain itu, beberapa proyek lainnya seperti mensurvei data lereng se-Indonesia, konstruksi lereng di Flores, dan advis teknis beberapa lokasi seperti NTB, Sumatera Utara, Aceh, Riau, Kaltim dan Bali juga telah berhasil dilaksanakan hingga tahun 2009.

Sukses melaksanakan berbagai tugas tersebut, lulusan S1 Teknik Geodesi di ITB ini melanjutkan S2 *Construction Contract Management* di UTM, Johor,

Nazib Faizal, S.T., M.Sc.,
Kepala Subdirektorat Analisis Data dan Pengembangan Sistem,
Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga

Malaysia di tahun 2010-2011. Selesai S2, langsung ditunjuk menjadi team leader eksplorasi aspal di Buton. "Tak perlu waktu lama, hanya dalam waktu 4 bulan proyek eksplorasi tersebut selesai. Menariknya, pada pertengahan 2012, saya diangkat sebagai Kepala Seksi Pengembangan Kerjasama," terangnya.

Berkat kerja keras dan senantiasa berusaha memberikan yang terbaik terhadap setiap pekerjaan yang dilaksanakan, membawa penyuka musik dan hobi main game ini pada jabatan Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi. "Disini, saya langsung diminta menjadi *team leader project delivery system* yang bertugas meriset sistem masalah pengadaan, sekaligus direksi teknis prototip *Smart Bridge* yang sangat humanis dan ramah lingkungan. Dalam pelaksanaannya, kedua proyek tersebut berhasil terselesaikan dengan baik dan tepat waktu," ujarinya.

Selanjutnya, di tahun 2016 Nazib Faizal dipindahkan menjadi Kasubdit Program, dan bersamaan dipercaya menjadi Ketua Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Apung yang harus membangun prototipe Jembatan Apung di Cilacap, Perpustakaan Terapung di Semarang, dan Pemecah Gelombang. Nazib Faizal mengungkapkan suka dukanya dalam pengerjaan jembatan apung ini, hingga akhirnya jembatan selesai dengan baik yang





sekaligus menjadi ikon wisata Kota Cilacap.

Menariknya, pada saat bersamaan pula pria yang pernah terlibat sebagai anggota delegasi Indonesia untuk kerja sama dengan Norwegia, Korea, Jepang, MIT, dan *International Road Federation* ini, juga menjadi *project officer Flyover* Antapani dan merevitalisasi kampus Pusjatan dengan menerapkan Sistem Pengadaan *Design and Build*. "Di tahun 2017, saya dipindahkan ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kasubdit Analisa Data dan Pengembangan Sistem. Di Ditjen Bina Marga, saya ditugaskan untuk meningkatkan kualitas data, sehingga data dapat sinergi, transparan, terintegrasi, dan akuntabel," jelasnya.

Mindset dan Perubahan

Terkait dengan penghargaan

sebagai pegawai teladan, Nazib Faizal menyebutkan jika dirinya sempat tidak percaya kenapa bisa memperoleh predikat tersebut. "Padahal saya ini tidak seteladan yang dibayangkan, saya cenderung *rock n roll*. Meskipun disatu sisi saya senang memperoleh penghargaan sebagai pegawai teladan, namun disisi lain justru menjadi beban dan tantangan bagi saya agar kedepannya bisa lebih baik lagi dari sekarang. Bahkan menjadi yang terbaik," akunya.

Menurutnya, pastikan bahwa kita memiliki "*mindset*" bahwa kehadiran kita harus bermanfaat untuk orang sekitar dan Kementerian PUPR. "Kalau kerja gak ada manfaatnya, ya percuma, nanti makan gaji buta, gak barokah. *Mindset* itu sangat penting apabila kita ingin mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Kalau kata

Damien Thomas, "*If you change your mindset, you have the ability to change your whole world*," tukasnya.

"Saya berpesan untuk generasi milenial, berkreasilah sebebas dan seluas-luasnya. Tuangkanlah ide-ide terbaik kalian, jangan pernah menyerah. Buat saya tidak masalah mereka main *handphone*, asal waktunya ujian mereka belajar, waktunya sholat mereka sholat dulu, sisanya mau *chatting*, mau *online* gak apa-apa," sebutnya.

"Berangkat dari pikiran yang positif, Insya Allah, alam semesta pasti menolong. Yang saya khawatir, generasi milenial itu apa-apa maunya instan. Padahal semuanya butuh proses, karena hasil itu bagaimana Tuhan. Kesusahan itulah yang menjadikan kita kuat, dan apa pun itu harus kita syukuri," pesan sosok ramah yang pernah menjadi perwakilan Indonesia untuk *Sharing Knowledge* di Kabul, Afghanistan. Untuk menjadi manusia sukses harus memiliki prestasi dan moral yang baik, serta jujur membuat identifikasi tentang diri. Nazib Faizal menegaskan, dengan menggali kelemahan yang ada pada diri sendiri, kita akan tahu perbaikan atau perubahan yang harus kita lakukan.

"Dengan berbekal mindset dan berani melakukan perubahan yang positif, diharapkan akan meningkatkan kinerja lebih baik lagi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder. Kita harus berani melakukan perubahan, karena musuh yang paling berat adalah mengalahkan diri sendiri. Kuncinya adalah *planning, do, check, and action*," pungkas Nazib Faizal optimis.

Lulus Uji Sertifikasi: KEMENTERIAN PUPR RAIH 3 SERTIFIKAT AKREDITASI



UNTUK ITU, BPSDM PUPR senantiasa meningkatkan kualitas SDM aparaturnya melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara berkala. Guna menjamin kualitas dari lembaga penyelenggara diklat, Kementerian PUPR pun melakukan akreditasi melalui Lembaga Akreditasi Nasional (LAN) RI.

3 Sertifikat

Di penghujung tahun 2018, Kementerian PUPR memperoleh tiga Sertifikat Akreditasi Lembaga Pelatihan Pemerintah dari LAN RI. Sertifikat tersebut diperoleh setelah melalui serangkaian tahapan proses akreditasi lembaga pelatihan pemerintah yang diselenggarakan LAN RI. Bersama dengan 28 Lembaga Pelatihan Pemerintah lainnya, Kementerian PUPR menerima sertifikat akreditasi pada 4 Desember 2018 lalu.

Adapun ketiga sertifikat akreditasi tersebut terdiri dari BPSDM PUPR sebagai instansi pengakreditasi diklat teknis bidang PUPR di bawah Kementerian PUPR maupun lembaga diklat pemerintah lainnya. Akreditasi tertanggal 18 Oktober 2018 ini berlaku selama lima tahun.

Akreditasi kedua diberikan kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) PUPR Wilayah III Jakarta sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi untuk

Pembangunan infrastruktur tidak bisa terlepas dari sepaik terjang sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, andal, dan profesional.



Sekretaris BPSDM KM. Arsyad menerima lembar sertifikasi dari Lembaga Administrasi Negara

menyelenggarakan dua program. Kedua program itu adalah (1) Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan Kategori Akreditasi B untuk masa berlaku 3 tahun, dan (2) Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dengan Kategori Akreditasi B untuk masa berlaku 3 tahun.

Akreditasi ketiga diberikan kepada Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah IV Bandung sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi untuk menyelenggarakan Program Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan Kategori Akreditasi A. Sertifikat Akreditasi ini berlaku selama 5 tahun.

Pada acara penyerahan sertifikat yang berlangsung di Aula Gedung A LAN, Jakarta, Kepala LAN—Adi Suryanto bersama dengan Deputi Kajian Kebijakan

yang merangkap Plt. Deputi Diklat Aparatur—Muhammad Taufiq menyerahkan sertifikat secara langsung kepada perwakilan Kementerian/Lembaga terakreditasi. Dalam hal ini, Kepala BPSDM PUPR—Lolly Martina Martief yang menerima sertifikat untuk kategori Akreditasi Pendelegasian Kewenangan Diklat Teknis.

Kemudian, Kepala Badiklat PUPR Wilayah III Jakarta—Yayak Rukiyana yang menerima sertifikat untuk kategori Akreditasi Penyelenggaraan Program Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III. Sementara, sertifikat Akreditasi Penyelenggaraan Program Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV diterima oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat BPSDM—Hary Prasetya yang mewakili Badiklat PUPR

Wilayah IV Bandung.

“Hasil penilaian akreditasi merupakan suatu kepercayaan LAN kepada Kementerian PUPR yang dianggap mampu menyelenggarakan kediklatan. Hal itu menjadi tanggung jawab kami agar lembaga diklat PUPR dapat terus meningkatkan kualitasnya sehingga SDM semakin kompeten di bidangnya,” ujar Lolly.

Akreditasi LAN

Sertifikasi akreditasi adalah sebuah upaya untuk memberikan apresiasi dan penjaminan mutu atas kualitas penyelenggaraan diklat pengembangan ASN. Di Indonesia, penerbitan sertifikasi akreditasi merupakan wewenang dari Lembaga Akreditasi Nasional (LAN) RI.

Khusus akreditasi terhadap

Lembaga Pelatihan Pemerintahan, LAN memberikan dua kategori akreditasi. Pertama, Kategori Akreditasi Penyelenggaraan Program yang meliputi Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III. Kedua, Kategori Akreditasi Pendelegasian Kewenangan yang meliputi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional. Pada termin ini, sebanyak 30 Lembaga Pelatihan Pemerintah mengajukan usulan akreditasi. Namun, hanya 28 lembaga saja yang dinyatakan berhak untuk memperoleh akreditasi. Kementerian PUPR adalah salah satunya.

Dengan akreditasi yang diterima Kementerian PUPR, diharapkan dapat terlahir SDM-SDM PUPR yang ahli, kompeten, andal, profesional, dan berdaya saing.



BPSDM TURUT AMBIL BAGIAN DALAM PAMERAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR HARBAK PU-73 DI GEDUNG SATE, BANDUNG

Masih dalam rangkaian peringatan Hari Bakti PU ke-73, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Pameran Pembangunan Infrastruktur Nasional 2018 di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.



PAMERAN bertajuk “*Dynamic Youth Fest*” seperti diibaratkan Menteri PUPR Basuki dan Ridwan Kamil sang gubernur Jawa Barat yang sangat dinamis dalam bekerja untuk rakyatnya.

Pembukaan pameran dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Minggu sore, (2/12/2018). Dalam sambutan pembukaannya, Menteri Basuki mengatakan peringatan Hari Bakti PU ke-73 sangat istimewa karena diselenggarakan di Gedung Sate yang dulunya bernama *Departement Verkeer en Waterstaat* (Departemen Transportasi, Pekerjaan Umum, dan Manajemen Air).

Kementerian PUPR juga menggelar Pameran Infrastruktur Nasional 2018 yang menyajikan hasil capaian Kementerian PUPR selama 5 tahun terakhir. Pameran diikuti oleh seluruh unit organisasi Kementerian PUPR termasuk Badan Peningkatan Penyelenggaraan



Air Minum (BPPSPAM) yang mempunyai tugas meningkatkan kinerja PDAM sebagai penyelenggara air minum di daerah. Acara juga dimeriahkan dengan konser musik dengan tema *Dynamic of Youth* untuk mendekatkan diri kepada generasi muda Indonesia sebagai penerus bangsa.

Di sini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) turut berpartisipasi dalam salah satu agenda tahunan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pameran tersebut digelar selama tiga hari, dari tanggal 2-4 Desember 2018. Sebagai badan yang bertugas dalam melaksanakan pengembangan sumber daya manusia PUPR, sejalan



dengan tema Harbak PU-73 ini, BPSDM menampilkan program-program yang mendukung SDM bidang PUPR dalam menghadapi persaingan global, antara lain program pendidikan dan pelatihan, serta *Assessment Center*.



Tidak hanya itu, ada pula games interaktif yang berhubungan dengan infrastruktur seperti Permainan Bangun jembatan yang menarik minat mahasiswa/i, selain itu ada pula Uji Kepribadian Individu yang berguna untuk melihat potensi karier kita ada di mana. Sedikit banyak bisa dijadikan panduan bagi siapapun yang masih ragu akan mengambil jalur karier apa. Pameran Pembangunan Infrastruktur Nasional tersebut merupakan salah satu laporan kepada masyarakat hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR yang telah diberikan amanah anggaran infrastruktur rata-rata sebesar Rp 100 triliun setiap tahunnya.

Menteri Basuki didampingi Ridwan Kamil dalam meninjau booth pameran dan melakukan penyerahan secara simbolis sertifikat tenaga kerja konstruksi kepada 30 orang perwakilan yang telah mengikuti Uji Kompetensi dan Sertifikasi di Kota Bandung pada Sabtu 1 Desember 2018 lalu.

Diharapkan melalui pameran pembangunan infrastruktur nasional ini, informasi tersebut dapat membantu *stakeholders*, khususnya pemerintah daerah serta mahasiswa dalam mengembangkan dan

meningkatkan kompetensi SDM.

Dalam peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum (Harbak PU) ke-73, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), M. Basuki Hadimuljono mengajak pegawai Kementerian PUPR untuk siap bekerja kapan saja dan dimana saja membangun infrastruktur konektivitas untuk mempersatukan Indonesia.

“Insan PUPR harus selalu menanamkan sikap bekerja keras dengan cerdas dan ikhlas, bergerak cepat dengan sigap dan cermat serta bertindak tepat dengan hasil yang bermanfaat. Karena kita adalah Kementerian PUPR yang siap bekerja kapan saja dan dimana saja” kata Menteri Basuki dalam upacara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum di Halaman Gedung Sate, Bandung, Senin (03/12/18).



Selain itu, Insan PUPR juga harus mampu memecahkan setiap persoalan dalam rangka membangun konektivitas untuk mempersatukan Indonesia, menyediakan tempat tinggal yang layak, meningkatkan ketahanan pangan dan air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Upacara bendera tersebut merupakan puncak rangkaian peringatan Harbak PU ke 73 yang untuk pertama kalinya dilakukan di Gedung Sate Bandung sebagai lokasi bersejarah tempat para pegawai PU yang gugur dalam mempertahankan gedung tersebut agar tidak jatuh kepada Sekutu tahun 1945 lalu.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengagumi kecepatan Kementerian PUPR dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur konektivitas di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kang Emil juga berharap dapat bekerja bersama dengan PUPR untuk membenahi Sungai Citarum. “Insan PUPR adalah pahlawan pembangunan karena mampu menciptakan infrastruktur konektivitas. Karena konektivitas adalah kunci untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Terimakasih kepada PUPR”, ujar Kang Emil.

Genmud PUPR, Ujung Tombak Kementerian PUPR

Generasi muda adalah generasi harapan bangsa, yang akan menjadi penopang negeri ini di masa depan.

KARENANYA, generasi muda harus mempersiapkan dan membekali dirinya. Tak hanya dengan keahlian dan keterampilan, melainkan juga—utamanya adalah, dengan akhlak yang mulia. Seperti halnya, Generasi Muda (Genmud) PUPR yang, kelak, akan menggenggam peran penting dalam pembangunan, melalui penyediaan infrastruktur.

Generasi Andalan

Kehadiran Genmud di lingkungan PUPR mendapat perhatian besar dari Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. Hal ini tampak dari kebijakan-kebijakan Menteri Basuki yang kerap melibatkan Genmud PUPR dalam setiap kegiatan.

Dalam setiap kesempatan, Menteri Basuki pun kerap berpesan kepada Genmud PUPR untuk senantiasa memegang nilai budaya kerja Kementerian PUPR, yakni berintegritas, profesional, berorientasi misi, visioner dan berakhlakul kharimah.

Selain keempat nilai budaya tersebut, Genmud PUPR sejatinya harus bekerja tuntas, ikhlas, dan pantang menyerah. Dengan begitu, Genmud PUPR selalu siap di mana pun ia ditugaskan, sekalipun ke daerah pelosok atau perbatasan dengan risiko keamanan yang tinggi.

Perhatian besar

Aditya Anwar,
Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi
Wilayah III



Menteri Basuki terhadap Genmud PUPR ini pun mendorong peran aktif Genmud di lingkungan PUPR. Bahkan, Genmud PUPR telah diberikan kepercayaan untuk tugas-tugas besar berskala nasional, bahkan internasional, seperti persiapan Asian Games ke-18 beberapa waktu lalu serta dalam menangani rehabilitasi pascagempa di Lombok dan Palu.



“Kami bersyukur dengan perhatian besar dari Pak Menteri. Sekarang ini, kami (Genmud) memang menjadi andalan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan PUPR. Seperti acara nobar beberapa waktu lalu, bahkan Pak Menteri sendiri yang langsung menunjuk kami untuk membuat



acaranya,” jelas Aditya Anwar, Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Wilayah III

Pembawa Perubahan

Bicara tentang Genmud, Aditya mengatakan bahwa tidak ada tanggal pasti terbentuknya Genmud PUPR. Sebutan “Generasi Muda PUPR” sendiri tercetus ketika para insan muda PUPR, mendapat penugasan dari Menteri Basuki untuk mengadakan kegiatan bakti sosial.

Hingga saat ini pun, belum terbentuk organisasi Genmud PUPR secara khusus. “Jadi, sifatnya masih insidental. Kalau ada acara yang harus diinisiasi, barulah kami berkumpul. Yang rutin, saat ini baru kegiatan basket. Itu pun hanya

untuk mereka yang hobi basket,” aku Aditya.

“Tapi, saat ini, kami sudah memiliki grup di sebuah aplikasi perpesanan. Grup ini menjadi wadah diskusi dan berbagi informasi untuk kami,” tambahnya.

Mengenai keanggotaan Genmud PUPR, Aditya menegaskan bahwa tidak ada batasan, terkait jabatan ataupun lokasi kerja. Hanya saja, keanggotaan dibatasi untuk angkatan 2005 hingga sekarang. “Saya pribadi mempunyai keinginan, nantinya, Genmud ini mempunyai kegiatan rutin. Jadi, tidak lagi bersifat insidental,” ujar Aditya.

Menurutnya, kegiatan rutin bisa

dimulai dari hal yang paling sederhana. Misalnya saja, dengan membuat kampanye tentang merokok, budaya naik lift, ataupun parkir. “Jadi, dari hal yang paling sederhana ini, Genmud PUPR bisa membawa perubahan positif, khususnya di lingkungan PUPR,” harapnya.

Ke depannya, Komunitas Genmud PUPR dapat menjadi wadah bagi setiap insan muda untuk berekspresi dan berpendapat, tanpa terhalang birokrasi. Disamping itu, komunitas ini diharapkan dapat menjadi corong/ujung tombak bagi Kementerian PUPR secara keseluruhan. Dengan demikian, Genmud dapat berkontribusi lebih besar yang, pada akhirnya, akan membawa perubahan positif di lingkungan Kementerian PUPR.

Inovasi Rumah Instan: Solusi Penyediaan Rumah yang Layak, Aman, dan Terjangkau

Inovasi rumah instan yang dikembangkan Puslitbang Permukiman Kementerian PUPR hadir sebagai solusi bagi pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat yang meningkat sangat pesat.

SOLUSI ini sekaligus menjadi langkah strategis Pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat. Khususnya, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana—baik gempa bumi maupun tsunami. Inovasi itu pun dihadirkan dalam wujud RISHA dan RIKA.

Solusi Rumah Instan

Kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan memadai terus meningkat setiap tahunnya, terutama di wilayah perkotaan. Pertumbuhan kebutuhan perumahan di perkotaan mencapai rata-rata 3,5% per tahunnya.

Namun, tingginya harga rumah akibat tingginya harga lahan dan material menyebabkan kepemilikan rumah hanya menjadi angan-angan bagi sebagian masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berangkat dari kondisi tersebut, Puslitbang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kementerian PUPR pun mengembangkan inovasi rumah yang instan, berkualitas, dan—tentu saja terjangkau. Salah satunya adalah RISHA atau Rumah Instan Sederhana Sehat. RISHA dirancang sedemikian rupa agar tidak membebani konsumen, baik dari sisi biaya produksi maupun pemasangannya.

Inovasi yang dikembangkan sejak tahun 2004 ini telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Hingga kini, ratusan unit RISHA telah didirikan di lebih dari 60 wilayah di Indonesia, yang diperuntukkan bagi warga kelas menengah ke bawah. Disamping itu, teknologi

rumah instan ini juga digunakan di daerah yang terkena bencana alam dan di lahan dengan kondisi yang sulit. “Salah satu tantangan kami dalam memasyarakatkan rumah instan ini adalah meyakinkan masyarakat bahwa rumah ini AMAN. Terlebih, di tengah masyarakat yang masih mengalami trauma akibat gempa,” jelas Achjat Dwiatno

Tahan Gempa

Tak ubahnya mainan bongkar pasang untuk anak-anak, RISHA juga tersusun atas komponen-komponen konstruksi berukuran modular yang dibuat secara pabrikasi. Konsep *knock down*—yaitu dengan menggabungkan panel-panel beton dengan beton—memungkinkan rumah dibangun tanpa semen dan bata sehingga prosesnya lebih cepat. Pembangunan setiap modul (3x3 m) bisa diselesaikan dalam waktu 24 jam oleh 3 pekerja.

Ukuran komponen yang sesuai ukuran modular menjadikannya fleksibel dan efisien dalam penggunaan bahan bangunan. Adapun komponen RISHA terdiri dari panel struktural (Komponen P1 & P2), panel penyambung/simpul (Komponen P3), panel dinding, dan panel kusen. Setiap panel memiliki harga bervariasi mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 160 ribu per meter persegi. Dengan demikian, untuk membangun rumah tipe 36 m², dibutuhkan biaya rata-rata Rp 50 juta.

RISHA pun dapat dibangun secara vertikal (2 lantai), dengan beberapa ketentuan. Di antaranya, beban hidup untuk lantai dan rumah tinggal sederhana

tidak boleh melebihi 125 kg/m², menggunakan konstruksi balok loteng dan papan kayu/multiblock untuk konstruksi lantai, serta tidak direkomendasikan untuk menggunakan lantai dari beton bertulang.

Selain mudah, instan, fleksibel, dan efisien, keunggulan lain RISHA adalah tahan gempa. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, teknologi RISHA selalu diterapkan di lokasi-lokasi yang terkena bencana, seperti di Lombok pascagempa dan Aceh pascatsunami.

“Di lokasi bencana, kami bukan sekadar membangun rumah contoh. Melainkan, juga melakukan sosialisasi, memberikan pencerahan dan pemahaman, bahkan memberikan pelatihan kepada masyarakat,” jelas Moch. Isa Iskandar Sabana.

Dari sisi kualitas, RISHA sangat terjamin karena sebagian besar material merupakan produk pabrikan sehingga meminimalkan faktor kesalahan manusia. Di sisi lain, pengembangan RISHA juga mendorong pertumbuhan UKM. Dalam hal ini, berkembangnya UKM di daerah yang memproduksi komponen-komponen panel.

RIKA

Berselang 6 tahun sejak RISHA dikembangkan, Puslitbang Permukiman kembali mengembangkan teknologi rumah instan lainnya. Di tahun 2010, Puslitbang Permukiman mengembangkan rumah instan berangka kayu yang diberi nama Rumah Instan Kayu (RIKA). RIKA mengusung berbagai keunggulan. Seperti halnya RISHA,

RIKA adalah rumah berkonsep *knock down* yang mudah, fleksibel, cepat, tahan gempa, dan terjangkau. Perbedaan keduanya terletak pada material penyusunnya. Jika RISHA memiliki struktur rangka berupa panel beton bertulang, RIKA menggunakan panel-panel berbahan kayu.

Untuk mengantisipasi sulitnya mendapatkan kayu berkualitas yang—biasanya memiliki harga sangat tinggi, RIKA dikembangkan dengan memanfaatkan kayu-kayu berkualitas rendah yang memiliki pertumbuhan relatif cepat. Jenis kayu yang digunakan, seperti sengon, karet, akasia, abasia, nangka, dan duren.

Meskipun kayu berkualitas rendah, panel kayu RIKA memiliki kualitas yang baik dan terjamin. Hal ini dikarenakan proses pengolahan kayu di pabrik yang menggunakan sistem *Laminated Veneer Lumber (LVL)*. Sistem LVL membuat kayu menjadi lebih keras dan kuat serta menghilangkan kelemahan kayu—seperti lapuk, rawan rayap, dan kuat tekan.

Komponen RIKA terdiri atas panel-panel beragam ukuran. Selain panel berukuran standar (60x120 cm), juga tersedia panel dinding berukuran 36 m² dengan tinggi 2,8 m. Panel dinding juga telah memiliki lubang-lubang untuk jendela. Adapula panel berupa balok kayu dengan ukuran 4,5x9,5 m.

Dibandingkan dengan RISHA, panel-panel RIKA memiliki bobot jauh lebih ringan. Bobot panel beton RISHA mencapai 2,4 ton/m³, sedangkan RIKA hanya 0,5 ton/m³. Begitu pun dari sisi harga, RIKA memiliki harga yang lebih

rendah dibanding RISHA. Untuk tipe yang sama (36 m²), RIKA hanya membutuhkan biaya rata-rata Rp 26 juta.

“Meskipun peminatnya tidak sebanyak RISHA, RIKA banyak dipilih masyarakat yang berada di lokasi bencana di Sumbawa,” ungkap Kuswara.

Pelatihan

Tak berhenti sampai pada pengembangan rumah instan, Kementerian PUPR juga memasyarakatkan inovasi ini sebagai sebuah solusi yang efektif dan efisien. Salah satu strateginya adalah dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memproduksi dan mendirikan rumah instan.

Selain masyarakat, pelatihan juga diberikan kepada UKM-UKM yang ingin menjadi aplikator (produsen panel). Dengan catatan, UKM harus mengajukan surat permohonan kepada Kepala Puslitbang Permukiman terlebih dahulu.

Persyaratan penting yang juga harus dipenuhi UKM adalah memiliki keinginan dan keyakinan terhadap teknologi ini serta memiliki badan formal, seperti koperasi dan CV. Nantinya, UKM juga akan diberikan lisensi secara cuma-cuma.

“Keunggulan dan kemudahan lainnya dari RISHA ataupun RIKA yang dibangun dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana adalah dari sisi pertanggungjawabannya yang lebih mudah dan praktis,” pungkas Muhajirin.

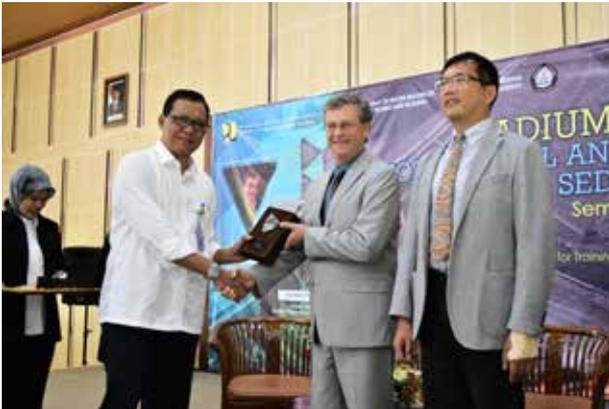
Sharing Knowledge Sistem Pembangunan Waduk Bersama Prof. Pierre Y Julien dan Mr. Kao

Pembangunan Bendungan: Antara Sosialisasi, Motivasi, dan Kompetensi

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 65 bendungan hingga tahun 2022 mendatang. Pembangunan bendungan ini merupakan rencana strategis Pemerintah dalam menjamin ketersediaan air guna mewujudkan ketahanan air yang menjadi kunci kedaulatan pangan.

Ketahanan Air

Pembangunan 65 bendungan di seluruh wilayah



Indonesia—khususnya di luar Pulau Jawa ditargetkan mampu meningkatkan ketersediaan tampungan air di Indonesia, menjadi 19,1 miliar meter kubik. Saat ini, ketersediaan tampungan air adalah sebesar 12,6 miliar meter kubik yang berasal dari 230 bendungan eksisting. Dengan jumlah bendungan eksisting, ketersediaan tampungan air baru dapat mengirigasi 760.000 hektar sawah dari 7,1 juta hektar sawah atau baru sekitar 10,5%. Sedangkan pengairan jutaan hektar lainnya, masih bergantung pada tadah hujan maupun bendung saja (non-bendungan).

Dengan demikian, pembangunan 65 bendungan akan menambah volume air yang ditampung yang, tentunya akan memperluas areal yang diairi. Nantinya, ke-65 bendungan diharapkan dapat mengairi 933.000



hektar sawah (35%). Dengan kata lain, kebutuhan air pertanian dapat terpenuhi sepanjang tahun. Untuk memperoleh manfaat tersebut, dibutuhkan waktu yang cukup panjang. Untuk membangun satu bendungan, setidaknya dibutuhkan waktu 3—4 tahun. Ditambah lagi, waktu untuk pengisian air hingga kapasitas optimalnya. Karenanya, Pemerintah menargetkan 29 bendungan selesai dibangun pada tahun 2019. Sedangkan, keseluruhan bendungan ditargetkan rampung pada tahun 2022 mendatang. Untuk pembangunan bendungan tersebut, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 70,1 triliun, melalui berbagai skema pembiayaan.

Sosialisasi

Beberapa pekan lalu, Kementerian melalui BPSDM mengundang pembicara

PUPR



Prof. Pierre Y. Julien

lintas negara terkait pembelajaran pada Pelatihan Operasi Waduk yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN PUPR dalam melakukan pengelolaan atau pengoperasian waduk yang optimal dengan teknik optimasi dan simulasi. Hadir sebagai narasumber dari Colorado State University USA, yaitu Prof. Pierre Y. Julien dan Mr. Kao, Hsien-Chang dari Sinotec Engineering Cons. Inc. dari Taiwan.

Prof. Pierre Y. Julien menjelaskan tentang Pembangunan waduk akan berjalan optimal bila pengelolaan waduk dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Operasi waduk sendiri merupakan kegiatan pengendalian air yang keluar dari waduk dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan air, pengendalian banjir, dan juga dalam rangka operasi keamanan bendungan sesuai dengan pola dan rencana operasi yang telah ditetapkan.

Selain itu, Prof. Pierre mengatakan SDM di Indonesia sudah baik. Hanya saja beberapa yang ia temui, masih banyak yang merasa tidak PD (Percaya Diri) dengan



Mr. Kao, Hsien-Chang

kemampuannya. Ahli teknik di Indonesia harus memiliki wadah khusus untuk meningkatkan kompetensinya. Dan ia dengar BPSDM memiliki banyak metode yang bagus untuk mengembangkan kapabilitasnya di bidang teknik, khususnya pembangunan waduk. Menurutnya, selain pembelajaran di bidang teknik kemampuan berbahasa pun harus lebih ditingkatkan, karena agar pesan yang diberikan mudah dimengerti.

Prof. Pierre pun mengatakan banyaknya manfaat dari dibangunnya bendungan antara lain; mengontrol debit air sehingga meminimalisir banjir, suplay air minum lebih bersih, untuk pengairan di bidang perkebunan dan tentunya sebagai sumber tenaga listrik. Selain itu, bisa juga sebagai ajang rekreasi bila dikelola dengan serius. Sehingga bisa turut meningkatkan pendapatan ekonomi penduduk sekitar.

Kendati memiliki beragam manfaat, kurangnya sosialisasi membuat pembangunan bendungan dihadapkan pada sebuah tantangan. Dalam hal ini, masih terdapat masyarakat yang meragukan—bahkan menolak pembangunan bendungan. Hal ini dikarenakan kekhawatiran masyarakat akan dampak yang bisa ditimbulkan dan jaminan keamanan bendungan.

Sejalan dengan hal tersebut, Mr. Kao mengatakan masih

banyak masyarakat yang berpikir bahwa bendungan tersebut akan berbahaya untuk kehidupan mereka. Kondisi ini seperti yang dialaminya saat terlibat dalam pembangunan sebuah bendungan di Taiwan.

“Saya berpikir, satu-satunya cara adalah membuat masyarakat terbuka pikirannya. Cara pandang masyarakat terhadap bendungan ini harus diluruskan. Pemerintah, tentunya memiliki tujuan untuk melayani masyarakat dan tidak akan merusak kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Belajar dari Pengalaman

Demi mencapai kesuksesan pembangunan dan juga pelestarian bendungan terbangun agar berkelanjutan, diperlukan kerja keras, motivasi, disiplin, dan kepedulian. “Indonesia ini unik. Masyarakatnya memiliki budaya yang kuat. Negeri ini mempunyai potensi alam yang besar,” ujar Mr. Kao.

“Namun, dari sisi pengalaman, menurut saya, masih kurang pengalaman dalam hal pembangunan bendungan. Saya pikir, hal ini bisa diantisipasi dengan cara menggandeng para ahli atau konsultan asing yang benar-benar berpengalaman,” imbuhnya.

“Saya yakin, negeri ini memiliki banyak tenaga ahli. Namun, menurut saya, mereka tetap harus belajar, memetik ilmu, ataupun menerima masukan dari pengalaman para tenaga ahli asing yang memang sudah memiliki jam terbang lebih tinggi. Dengan demikian, dapat menjaga agar teknologi yang dikuasai tetap produktif,” tutup Mr. Kao.

Tanya Jawab

Seputar Aplikasi E-Learning



Yth. Redaksi Buletin Parampara,

Saya ingin tahu lebih lanjut mengenai aplikasi apa saja yang sedang dikembangkan oleh BPSDM, dan apakah ini dapat diakses oleh umum, selain ASN PUPR maksudnya? Terima kasih.

Rieka – Medan, Sumatera Utara.

Hai Rieka, untuk saat ini aplikasi yang sedang kami kembangkan banyak sekali. Di antaranya, antara lain E-Pelatihan, E-SPPD, E-Kinerja, dan E-LKP. Untuk saat ini, aplikasi kami memang ditujukan untuk seluruh ASN PUPR guna meningkatkan kinerja masing-masing unit dan menjadikannya lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu tidak bisa diakses oleh umum.

Tetapi jika hanya ingin mengetahui tentang kegiatan kami, bisa akses situs kami di bpsdm.pu.go.id atau follow akun media sosial kami di Twitter (@BPSDM_PUPR), Instagram ([bpsdm_pupr](https://www.instagram.com/bpsdm_pupr)), Facebook ([BpsdmPupr](https://www.facebook.com/BpsdmPupr)), maupun YouTube ([BpsdmPupr](https://www.youtube.com/BpsdmPupr)). Terima kasih. Salam PUPR!

Yth. Redaksi Buletin Parampara,

Saya mau tanya, apakah seluruh aplikasi yang dikembangkan sudah terintegrasi dengan Pusat di PUPR, mengingat banyaknya aplikasi yang telah dibuat? Terima kasih.

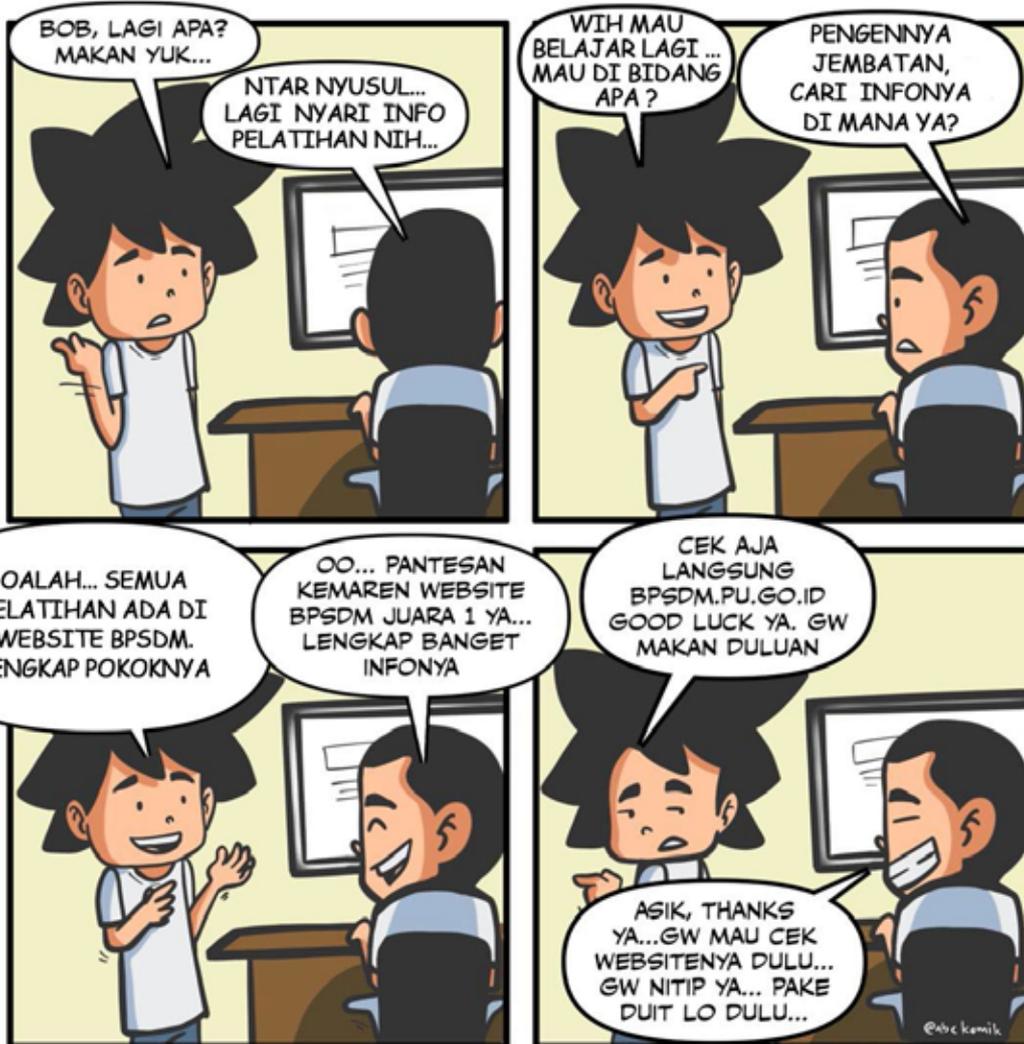
Yoseph – Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

Hai Yoseph, sebagai informasi, Pengembangan Sistem aplikasi BPSDM, seperti aplikasi E-Kinerja, E-Lembar Kerja Pegawai, ini sudah terintegrasi dengan aplikasi yang dikembangkan oleh Pusat Data dan Informasi yaitu TNDE (e-Office) dan E-Absensi serta aplikasi yang dikembangkan oleh Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PUPR, yaitu E-HRM. Untuk itu, diperlukan komunikasi data yang terhubung antar aplikasi dengan baik.

Salah satu aplikasi yang akan dintegrasikan dengan aplikasi di BPSDM ini adalah aplikasi TNDE. Hal ini dikarenakan aplikasi di BPSDM, seperti E-LKP dan E-SPPD, sangat bergantung pada aplikasi TNDE sebagai sumber data. Dengan terintegrasinya aplikasi BPSDM dengan aplikasi yang dikembangkan di Kementerian PUPR akan tercipta ekosistem kompleks data, dan diharapkan akan mempermudah mendapatkan data dan informasi yang valid dengan cepat, aman, dan akurat. Terima kasih. Salam PUPR!

Apabila ada pertanyaan terkait sumber daya manusia Kementerian PUPR dapat dikirimkan ke email : datin.bpsdm@gmail.com

BPSDM x KOMIK ABC



Source : Ari Wibowo



HARBAK PU

